

RINGKASAN

TRI MINATI, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Alasan Yuridis Pengabulan Permohonan *actio pauliana* pada Aset yang Dibebani Hak Tanggungan dalam Putusan Nomor 461K/Pdt.sus-Pailit/2019. Komisi pembimbing ketua: Prof.Tri Lisiani Prihatinah,S.H.,M.A.,Ph.D, anggota: Dr.Sulistiyandari,S.H.,M.Hum.

Pembebanan Hak Tanggungan merupakan upaya perlindungan terhadap kreditur atas perjanjian kredit dari tindakan wanprestasi Debitor dikemudian hari. Hak Tanggungan lahir pada saat didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional dalam hal pendaftaran PPAT yang merupakan pejabat yang bertugas membantu tugas Badan Pertanahan membuat APHT. Pembebanan Hak Tanggungan yang sudah didaftarkan sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan masih mungkin dibatalkan oleh Hakim seperti dalam kasus putusan Kasai Nomor 461 K/Pdt.sus-pailit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis alasan yuridis pengabulan permohonan *actio pauliana* pada aset yang dibebani Hak Tanggungan pada putusan Nomor 461K/Pdt.sus-Pailit/2019, Untuk menganalisis implikasi hukum akibat pengabulan permohonan *actio pauliana* pada aset yang dibebani Hak Tanggungan pada putusan Nomor 461K/Pdt.sus-Pailit/2019 terhadap kreditur, Untuk menganalisis peran PPAT untuk mencegah pembatalan APHT pada putusan nomor 461 K/Pdt.sus-pailit/2019. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data normatif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 461K/Pdt.sus-Pailit/2019 perjanjian kredit yang dilakukan sodari R.S.W dengan persetujuan suami D.H batal tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan perjanjian pranikah yang dibuat tidak didaftarkan di Pegawai Pencatatan Sipil berakibat kepailitan persatuan harta, karena perjanjian pranikah yang tidak didaftarkan tidak berlaku untuk pihak ketiga. Implikasi hukum batalnya dan tidak berkekuatan hukum perjanjian kredit berakibat terhadap kreditur yaitu bank atas objek Hak Tanggungan yang menjadi harta pailit dari suami (DH) debitur istri (R.S.W), akibat dari itu kreditur pemegang Hak Tanggungan mengembalikan objek jaminan kepada debitur dan sebaliknya debitur mengembalikan uang kredit kepada kreditur. PPAT mempunyai peran penting dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum dalam hal ini terkait dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dalam proses pembuatannya PPAT melaksanakan pengecekan data para pihak yang hadir beserta dokumen yang menjadi syarat pembuatan akta sesuai Peraturan yang berlaku sebelum dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Kata kunci : Hak Tanggungan, Kepailitan, Peran PPAT

Summary

TRI MINATI, Master of Notary Study Program, Faculty of Law, University of Jenderal Soedirman Purwokerto, Juridical reasons for the application for actio pauliana on assets burdened with mortgage rights in Decision Number 461K/Pdt.sus-Bankrupt/2019. Chairman supervising commission: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D, members: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Mortgage encumbrance is an effort to protect the creditor of the credit agreement from the debtor's default in the future. Mortgage Rights are born when registered at the National Land Agency office in the case of PPAT registration, which is an official in charge of assisting the duties of the Land Agency to make APHT. Mortgage encumbrance that has been registered in accordance with Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights may still be cancelled by the Judge as in the case of Kasai Decision Number 461 K/Pdt.sus-bankruptcy. The purpose of this study is to analyse the juridical reasons for the granting of the actio pauliana application on assets encumbered by Mortgage Rights in decision Number 461K/Pdt.sus-Bankruptcy/2019, to analyse the legal implications of the granting of the actio pauliana application on assets encumbered by Mortgage Rights in decision Number 461K/Pdt. To analyse the role of PPAT to prevent the cancellation of APHT in decision number 461 K/Pdt.sus-bankruptcy/2019. Normative juridical research method with a statute approach, conceptual approach, and case approach. Qualitative normative data analysis.

The results showed that the judge's reasoning in deciding case number 461K / Pdt.sus - Bankruptcy / 2019 the credit agreement made by sodari R.S.W with the consent of husband D.H was void and had no legal force based on the prenuptial agreement made not registered at the Civil Registration Office resulting in the bankruptcy of the property union, because the prenuptial agreement that was not registered did not apply to third parties. The legal implications of the cancellation and legal ineffectiveness of the credit agreement have an impact on the creditor, namely the bank on the object of the Mortgage which becomes the bankrupt property of the husband (DH) of the debtor wife (R.S.W), as a result of which the creditor holding the Mortgage returns the object of collateral to the debtor and vice versa the debtor returns the credit money to the creditor. PPAT has an important role in exercising its authority as a public official in this case related to the making of the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT), in the process of making it PPAT checks the data of the parties present along with the documents that are a requirement for making a deed in accordance with the applicable regulations before registering the Mortgage Rights at the National Land Agency Office.

Keywords: Mortgage, Bankruptcy, PPAT role